



Dampak Peningkatan Belanja Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil

Sonny Sumarsono¹, Kusnanto Nugroho²

¹ADW Consulting, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, Jakarta, Indonesia,

²Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Jakarta, Indonesia.

Informasi Artikel

Sejarah artikel:

Diterima, Mar 3, 2024

Revisi, Mar 20, 2024

Disetujui, Apr 11, 2024

Kata kunci:

Pengadaan Barang/Jasa,
Produk Dalam Negeri,
Industri Mikro dan Kecil.

ABSTRAK

Pengeluaran Pemerintah (Government Expenditure) yang salah satunya dilakukan melalui pengadaan barang/jasa, dalam konsep ekonomi makro terutama aliran Keynesian merupakan kebijakan fiskal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari pertumbuhan industri nasional, Pemerintah mengimplementasikan Program Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sebagai upaya untuk melindungi sekaligus memberdayakan industri nasional termasuk Industri Mikro dan Kecil. Belanja pengadaan barang/jasa yang dikhususkan untuk menyediakan Produk Dalam Negeri diharapkan memberikan multiplier effect untuk pertumbuhan ekonomi terutama bagi Industri Mikro dan Kecil yang banyak menyerap tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan estimasi dampak Belanja Produk Dalam Negeri yang dilakukan oleh Pemerintah bagi pertumbuhan usaha Industri Mikro dan Kecil. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan metode deskriptif dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Produk Dalam Negeri memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil terutama dalam meningkatkan Kapasitas Produksi.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Korespondensi Penulis:

Sonny Sumarsono,

ADW Consulting,

Treasury Tower, 11th floor, District-8, SCBD Lot-28, Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190

Email: sonny.sumarsono@adw.co.id

1. PENDAHULUAN

Kecenderungan perdagangan global yang semakin terbuka merupakan suatu keniscayaan yang dihadapi oleh pelaku usaha di Indonesia. Hal tersebut dapat menjadi tantangan sekaligus juga peluang bagi pelaku ekonomi lokal terutama Industri Mikro dan Kecil. Permasalahannya justru sebaliknya, produk impor dengan competitiveness yang tinggi lebih mendominasi pasar nasional dan belum mampu diimbangi secara optimal oleh pelaku usaha nasional terutama usaha kecil bahkan UMKM. Menurut Amri (2014) di balik besarnya peran usaha mikro, kecil, dan menengah bagi dunia usaha, mereka masih menghadapi permasalahan kurangnya kualifikasi sumber daya manusia, iklim investasi dan iklim usaha kurang baik, kurang bimbingan dan pembinaan yang lebih sedikit, teknologi rendah, sumber daya modal sedikit, tradisional pengelolaan, kekurangan infrastruktur, sulitnya memperoleh bahan baku, sulitnya izin usaha, sulitnya memasarkan produk, dan lain-lain masalah. Dari berbagai permasalahan tersebut menyebabkan produktivitas turun dan rendah daya saing.

Pemerintah selama ini telah berupaya untuk mengurangi atau mengimbangi dominasi produk impor di pasar domestik melalui berbagai kebijakan dan kampanye peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk melindungi industri nasional, baik industri dengan skala besar maupun industri mikro dan kecil. Secara spesifik industri atau usaha mikro dan kecil inilah yang banyak terdampak oleh maraknya produk impor di pasar lokal. Padahal industri mikro dan kecil selama ini menjadi penopang ekonomi nasional dimana menurut BPS pada tahun 2016 saja jumlah usaha ini mencapai lebih dari 26 juta usaha atau 98,68 persen dari total usaha nonpertanian di Indonesia. Usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja Indonesia lebih dari 59 juta orang atau sekitar 75,33 persen dari total tenaga kerja nonpertanian (SE Ekonomi BPS, 2016). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi (Mokodaser, Maramis, & Tooy, 2022)

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sebagaimana tertuang pada UU No 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal 85 “untuk pemberdayaan Industri dalam negeri, Pemerintah meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri” merupakan komitmen Pemerintah Indonesia yang selaras dengan visi dan misi pemberdayaan industri nasional pada Rencana Bangun Industri Nasional Tahun 2035 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh pembangunan ekonomi yang efektif dan digerakkan oleh kemajuan di sektor industri nasional sebagai kontributor utama. Pertumbuhan sektor industri dalam negeri memberikan multiplier effect yang dapat mendorong perkembangan sektor-sektor lain, meningkatkan nilai tambah, dan menciptakan lapangan kerja. Secara umum tujuan P3DN adalah memberdayakan Industri dalam negeri dan memperkuat struktur Industri (PP No 29 Tahun 2018).

Produk Dalam Negeri itu sendiri merupakan Barang dan Jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri. (Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 86 mewajibkan untuk menggunakan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan barang/jasanya kepada beberapa kategori instansi yang terkategori sebagai Pengguna Produk Dalam Negeri sebagai berikut:

1. Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang/jasa apabila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, termasuk pinjaman atau hibah dari dalam negeri atau luar negeri.
2. BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta dalam pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya berasal dari APBN, APBD dan/atau pekerjaan-nya dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah dengan badan usaha swasta dan/atau mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara.

Kurang masifnya penggunaan produk dalam negeri terutama di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) pemerintah melalui Presiden menginstruksikan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka menyukseskan Gerakan Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Inpres No Tahun 2022 ini menginstruksikan antara lain:

1. Meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Meningkatkan persentase penggunaan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Meningkatkan alokasi dan realisasi anggaran untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK).
4. Meningkatkan proses pengadaan secara sistematis pada sistem e-catalog dan pemanfaatan satu data Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK)

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah belanja pemerintah (*Government Expenditure*) melalui pengadaan barang/jasa untuk membeli Produk Dalam Negeri akan meningkatkan pertumbuhan Industri Mikro Dan Kecil baik dilihat dari peningkatan kapasitas produksinya maupun dalam meningkatkan kesempatan kerja dari daya serap tenaga kerja industri mikro dan kecil yang pada akhirnya meningkatkan ekonomi masyarakat. Dalam teori Makroekonomi, khususnya aliran pemikiran Keynesian, menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah dianggap sebagai kekuatan eksogen yang mengubah output agregat (Loizides & Vamvoukas, 2005). Pertumbuhan ekonomi meningkatkan kapasitas produksi. Oleh karena itu, apa pun yang meningkatkan kapasitas produksi tersebut adalah pertumbuhan ekonomi (Khan Academy). Gnanon (2021) dalam penelitiannya menunjukkan adanya kapasitas produktif mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi volatilitas pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang menghadapi krisis tingkat kerentanan ekonomi struktural.

Sebelumnya Kasau & Laan (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Investasi dan Kesempatan Kerja baik langsung, tidak langsung maupun secara total. Juardi dan Juaris (2022) juga dalam penelitiannya menunjukan bahwa pengeluaran pemerintah melalui pengeluaran infrastruktur, pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja. Sedangkan menurut Fouladi (2010) meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk aspek konsumsi menyebabkan penurunan produksi, lapangan kerja dan investasi sedangkan pengeluaran pemerintah untuk aspek investasi dapat berbeda-beda dampaknya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif menggunakan regresi linear berganda. Regresi linear berganda dilakukan untuk menguji:

- Variabel dependen yaitu Jumlah Tenaga Kerja IMK dipengaruhi oleh variabel independen yaitu Pertumbuhan Industri IMK yaitu Indeks Produksi IMK, Jumlah Perusahaan IMK dan variabel kontrol yaitu Belanja PDN, Belanja Pengadaan, Belanja Pengadaan IMK, dan PDRB (**Model 1**).
- Variabel dependen yaitu Indeks Produksi IMK dipengaruhi oleh variabel independen yaitu Belanja PDN dan variabel kontrol yaitu Belanja Pengadaan, Belanja Pengadaan IMK, PDRB, dan Jumlah Perusahaan (**Model 2**).

Spesifikasi model pada penelitian ini menjelaskan secara panel bahwa variabel Jumlah IMK i pada periode t dan Pertumbuhan Indeks IMK i pada periode t dan Pertumbuhan Jumlah Perusahaan i pada periode t . Kemudian dijelaskan Indeks Produksi IMK i pada periode t dan Belanja PDN i pada periode t .

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Model 1

$$TK_IMK_{it} = \alpha + \beta_1 ID_PDKS_{it} + \beta_2 PU_IMK_{it} + \beta_3 PDN_{it} + \beta_4 PBJ_{it} + \beta_5 PBJ_UMK_{it} + \beta_6 PDRB_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

TK_IMK_{it}	:	Variabel dependen Jumlah Perusahaan Industri Mikro & Kecil periode i pada periode t
ID_PDKS_{it}	:	Variabel Indeks Produksi Industri Mikro & Kecil i pada periode t
PU_IMK_{it}	:	Jumlah Perusahaan Industri Mikro & Kecil pada Provinsi i pada periode i
B_PDN_{it}	:	Jumlah Belanja PDN i pada periode t
B_PBJ_{it}	:	Jumlah Belanja Pengadaan Keseluruhan i pada periode t
PBJ_UMK	:	Jumlah Belanja Pengadaan Alokasi Usaha Kecil (<15 Miliar) i periode t
$PDRB_{it}$:	Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi i pada periode t
ε_{it}	:	<i>Error term</i>

Model 2

$$ID_PDKS_{it} = \alpha + \beta_1 PDN_{it} + \beta_2 PBJ_{it} + \beta_3 PBJ_UMK_{it} + \beta_4 PDRB_{it} + \beta_5 PU_IMK_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

ID_PDKS _{it}	:	Variabel dependen Indeks Produksi Industri Mikro & Kecil i pada periode t
B_PDN _{it}	:	Jumlah Belanja PDN i pada periode t
B_PBJ _{it}	:	Jumlah Belanja Pengadaan Keseluruhan i pada periode t
PBJ_UMK	:	Jumlah Belanja Pengadaan Alokasi Usaha Kecil (<15 Miliar) i periode t
PDRB _{it}	:	Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi i pada periode t
PU_IMK _{it}	:	Jumlah Perusahaan IMK pada Provinsi tempat UKPBJ Stranas PK I pada periode i
ε _{it}	:	Error term

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif menunjukkan deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi (standard deviation), maksimum dan minimum. Berikut ini adalah data analisis deskriptif penelitian dan distribusi dari variabel dependen dan variabel independent:

Tabel 1. Analisis Deskriptif Penelitian

Variabel	Obs	Mean	Std Dev	Min	Max
Model 1					
TK_IMK	68	274629	499003	11421	2363148
PU_IMK	68	128718	203369	6069	855488
PDRB	68	339398	481104	29110	1953456
Model 2					
ID_PDKS	68	192.1	1.2	95.7	474.7
B_PDN	68	3442	3950	160	19939
B_PBJ	68	6444	5094	1253	24712
PBJ_UMK	68	5079	4091	1045	202322
PDRB	68	339398	481104	29110	1953456
PU_IMK	68	128718	203369	6069	855488

Dengan mengetahui karakteristik observasi, diharapkan dapat ditemukan gejala termasuk indikasi untuk mendukung analisis penelitian. Penelitian ini memiliki 68 observasi dari setiap variabel yang digunakan secara panel berdasarkan jumlah Provinsi dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Model 1 menjelaskan keterkaitan pertumbuhan tenaga kerja pada Industri Mikro dan Kecil dengan pertumbuhan jumlah Perusahaan yang terkategori Industri Mikro dan Kecil. Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan selama masa pandemi Covid-19 khususnya pada tahun 2020 dan 2021 (Lihat Gambar 1). Meskipun pada masa pandemi terjadi kelesuan ekonomi di berbagai sektor, ada hal yang menarik dimana pada tahun 2020 terdapat penurunan jumlah perusahaan sebanyak 170.359 unit usaha, tetapi ada peningkatan 72.096 Tenaga Kerja yang terserap Industri Mikro dan Kecil. Hal ini menunjukkan bahwa Industri Mikro dan Kecil mampu bertahan di tengah pandemi sekalipun ditandai dengan tumbuhnya beberapa sektor industri tertentu yang meningkatkan tenaga kerja.



Gambar 1. Pertumbuhan Jumlah Perusahaan & Tenaga Kerja 5 Tahun Terakhir (dalam Ribuan)

Sumber: BPS

Untuk membuktikan apakah belanja pemerintah yang dikeluarkan dapat berdampak secara multiplier menumbuhkan Industri Mirko dan Kecil sekaligus meningkatkan kesempatan kerja (Model 1), perlu dilakukan uji korelasi terlebih dahulu apakah pertumbuhan Industri Mikro & Kecil itu sendiri dapat meningkatkan Tenaga Kerja. Estimasi hubungan pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil dan Tenaga Kerja dilakukan melalui regresi linear berganda dan memilih model terbaik dari Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Kemudian dilakukan Uji Chow, Hausman dan Lagrange Multiplier. Setelah dilakukan ketiga uji tersebut maka Random Effect Model (REM) terpilih menjadi model terbaik dalam menganalisa hasil estimasi asosiasi antara jumlah perusahaan pada Industri Mikro dan Kecil dan Jumlah Tenaga Kerja.

Tabel 2. Hasil Estimasi Model 1

Dependent Variable: TK_IMK

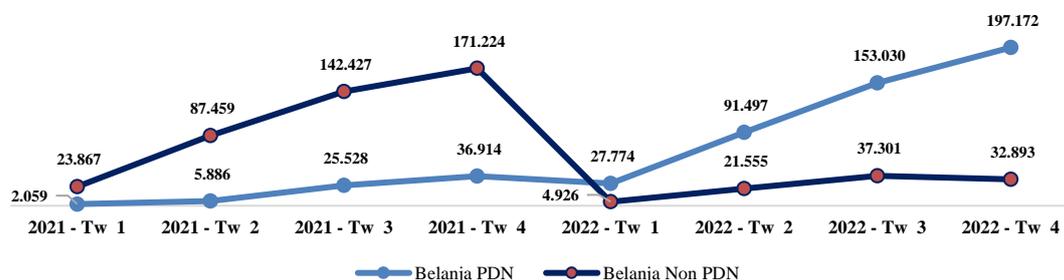
Variabel	Coefficient	Std Error	t-Statistic	Prob.
C	-96347.57	44998	-2.141152	0.0363
ID_PDKS	174.0195	176.2651	0.987260	0.3274
PU_IMK	2.183724	0.121739	17.93775	0.0000
B_PDN	-1.052610	1.670276	-0.630201	0.5309
B_PBJ	-11.71442	10.03016	-1.167920	0.2474
PBJ_UMK	19.77991	13.57705	1.456863	0.1503
PDRB	0.103410	0.049383	2.094059	0.0404
Weighted Statistic				
R-squared	0.943704			
Adjusted R-squared	0.941972			
Prob (F-Statistic)	0.000000			

Sumber: Olahan Peneliti

Pada estimasi model 1 parameter pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil dipengaruhi secara signifikan oleh Pertumbuhan Perusahaan dan Pendapatan Domestik Bruto Regional. Pertumbuhan kapasitas produksi yang ditunjukkan dengan Indeks Produksi Industri Mikro dan Kecil Regional berpengaruh tidak signifikan terhadap peningkatan Tenaga Kerja. Sedangkan peningkatan Perusahaan Industri Mikro & Kecil berasosiasi positif dan signifikan terhadap Tenaga Kerja pada Industri Mikro dan Kecil yang mengindikasikan potensi peningkatan tenaga kerja sebesar 2.18 dari setiap penambahan satu Industri Mikro dan Kecil baru. Selanjutnya akan dideskripsikan hasil penelitian bagaimana peningkatan belanja Produksi Dalam Negeri memberikan dampak terhadap Industri Mikro dan Kecil melalui pertumbuhan kapasitas Produksi.

Sejak Inpres Nomor 2 Tahun 2022 diterbitkan Pemerintah tidak hanya berfokus pada Percepatan program percepatan P3DN tetapi juga peningkatan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMKK). Produk Dalam Negeri dan UMKK dipercaya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sehingga keduanya mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah. Peningkatan Belanja PDN yang didorong dari program percepatan P3DN diharapkan banyak menyasar kepada UMKK apalagi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah K/L/Pemda wajib mengalokasikan pengadaan sampai dengan 15 Miliar kepada Usaha Kecil (Usaha Mikro dan Kecil).

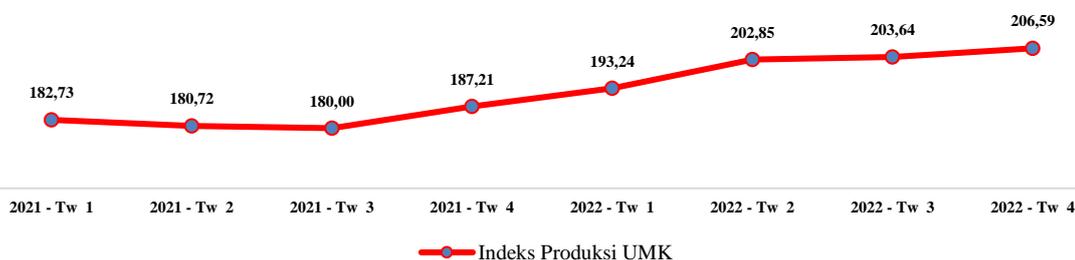
Inpres Nomor 2 Tahun 2022 yang diterbitkan pada 30 Maret 2022 (akhir kuartal pertama tahun 2023) menunjukkan peningkatan belanja PDN secara signifikan dimulai pada triwulan pertama sampai dengan triwulan keempat tahun 2022, bahkan dominasi belanja non PDN pada tahun 2021 bergeser (shifting) digantikan oleh Produk Dalam Negeri pada tahun 2022 (Lihat Gambar 2).



Gambar 2. Pertumbuhan Belanja PDN dan Non PDN Tahun 2021-2022 (dalam Miliar)

Sumber: LKPP

Menjelang akhir masa pandemi pada triwulan kesatu sampai dengan triwulan ketiga tahun 2021 pertumbuhan produksi Industri Mikro dan Kecil masih menurun hal ini juga dapat dilihat dari Belanja PDN Pemerintah yang meskipun mengalami kenaikan namun tidak signifikan bahkan belanja pemerintah pada triwulan kesatu sampai keempat pada tahun yang sama masih di dominasi belanja Non Produk Dalam Negeri (Non PDN). Selaras dengan belanja PDN pada tahun 2021 yang rendah, Indeks Produksi Industri Mikro dan Kecil juga mengalami penurunan pada triwulan ketiga tahun 2021, meskipun penyebab utamanya diduga akibat diberlakukannya PPKM pada triwulan tersebut. Indeks produksi pada Industri Mikro dan Kecil baru mengalami kenaikan pada triwulan keempat dan naik cukup signifikan pada tahun 2022 terutama pada triwulan pertama dan kedua tahun tersebut.



Gambar 3. Trend Indeks Produksi Nasional Tahun 2021-2022

Sumber: BPS

Estimasi dampak Peningkatan Belanja Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa Produk Dalam Negeri terhadap pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil yang ditunjukkan dengan Trend Indeks Produksi Regional (Model 2) dilakukan melalui regresi linear berganda dan memilih model Fixed Effect Model (FEM) menjadi model terbaik dalam menganalisa hasil estimasi asosiasi antara Belanja Produksi Dalam Negeri dengan Trend Indeks Produksi pada Industri Mikro dan Kecil.

Tabel 3. Hasil Estimasi Model 2

Dependent Variable: ID_PDKS

Variabel	Coefficient	Std Error	t-Statistic	Prob.
C	303.7303	90.85835	3.35906	0.0022
B_PDN	0.004605	0.001458	3.158809	0.0037
B_PBJ	0.014811	0.00700	2.115872	0.0431
PBJ_UMK	-0.028549	0.011669	-2.446544	0.0207
PDRB	-0.000355	0.000313	-1.133002	0.2665
PU_IMK	0.000322	0.000358	0.900379	0.3753

Weighted Statistic

R-squared	0.977537
Adjusted R-squared	0.948102

Prob (F-Statistic) 0.000000

Sumber: Olahan Peneliti

Pada estimasi model 2 parameter Indeks Produksi Industri Mikro & Kecil dipengaruhi secara signifikan oleh Belanja Produk Dalam Negeri, Belanja Pengadaan Barang/Jasa (PDN & Non PDN), Belanja Barang/Jasa Alokasi Khusus untuk Usaha Kecil (<15 Miliar). Belanja Produk Dalam Negeri berasosiasi positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil melalui pertumbuhan Indeks Kapasitas Produksi Industri Mikro dan Kecil yang mengindikasikan potensi peningkatan Indeks Produksi sebesar 0.0046. Hasil asosiasi positif dan signifikan juga ditunjukkan pada variabel Belanja Pemerintah baik Produksi Dalam Negeri maupun Non Produksi Dalam Negeri yang mempengaruhi Indeks Produksi Industri Mikro dan Kecil sebesar 0,0148. Alokasi Pengadaan Barang/Jasa yang dikhususkan untuk IMK ternyata memiliki asosiasi negatif meskipun mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Produksi Industri Mikro dan Kecil sebesar -0,0285.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan estimasi secara empiris bahwa penerapan Program Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Program Percepatan P3DN) mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil yang ditunjukkan dengan Peningkatan Kapasitas Produksi Industri Mikro dan Kecil yang pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah dan kapasitas usaha serta menyerap tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan statistik deskriptif. Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk menguji dependen variabel Belanja Produk Dalam Negeri dan variabel independen utama penelitian ini yaitu Indeks Produksi Industri Mikro dan Kecil. Selain variabel utama, penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu Belanja Pengadaan Barang/Jasa (PDN dan Non PDN), Belanja Pengadaan Alokasi Kecil (<15 Miliar), Produk Domestik Regional Bruto, dan Jumlah Perusahaan Industri Mikro dan Kecil.

Hasil dari regresi linear menunjukkan bahwa Belanja Produk Dalam Negeri berasosiasi positif dan signifikan pada Peningkatan Indeks Produksi Industri Mikro dan Kecil yang mengindikasikan potensi kenaikan sebesar 0,46% Indeks Produksi untuk setiap kenaikan satu miliar belanja Produk Dalam Negeri. Upaya pemerintah dalam melakukan kampanye peningkatan belanja Produk Dalam Negeri dibuktikan dengan meningkatnya belanja PDN pada tahun 2022 yang berdampak pada peningkatan Industri terutama Usaha Mikro dan Kecil yang banyak menyerap tenaga kerja.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Pengeluaran Pemerintah (*Government Expenditure*) secara *multiplier effect* dapat meningkatkan pertumbuhan industri dan pada akhirnya meningkatkan kesempatan kerja yang selaras dengan penelitian sebelumnya. Harijono & Utama (2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesempatan kerja di Provinsi Bali. Danawati, Bendesa, & Utama (2016) memperlihatkan hasil penelitian bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja.

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu rujukan Pemerintah dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien guna mengoptimalkan belanja pengadaan dari PDN yang *Value for Money* sebagaimana tercantum pada tujuan Pengadaan Barang/Jasa Perpres 16 Tahun 2018 dan perubahannya Pasal 4 huruf a yaitu “menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia”. Untuk mengoptimalkan belanja PDN fokus pemerintah sebaiknya bukan hanya meningkatkan alokasi belanjanya tetapi juga bagaimana mengembangkan iklim bisnis pelaku usaha terutama Industri Mikro dan Kecil untuk memastikan ketersediaan PDN yang berkualitas.

REFERENSI

- [1] Amri, Fahimul. (2014). Permasalahan UMKM: Strategi dan Kebijakan. *Prosiding Pluralisme Dalam Ekonomi Dan Pendidikan*
- [2] Danawati, Sri., Bendesa, I K.G., & Utama, Made Suyana. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta

Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*

- [3] Fouladi, Masoome. (2010). The Impact of Government Expenditure on GDP, Employment and Private Investment a CGE Model Approach. *Iranian Economic Review*
- [4] Gnanon, Senna Kim (2021). Productive Capacities, Economic Growth and Economic Growth Volatility in Developing Countries: Does Structural Economic Vulnerability Matter?. *Preprints*
- [5] Harijono, Gatot Setio., & Utama, I Made. (2013). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja melalui Pertumbuhan Ekonomi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*
- [6] Kasau, M Kasan., & Laan, Rahmat. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kesempatan Kerja Melalui Investasi dan Dampaknya Terhadap Kawasan Timur dan Barat Indonesia. *JM*
- [7] Loizides, John., & Vamvoukas, George. (2005). Government Expenditure Andeconomic Growth: Evidence From Trivariate Causality Testing. *Journal of Applied Economics*
- [8] Mokodaser, Andreas B., Maramis, Marchel., & Tooy, Christine. (2022). DAMPAK Digitalisasi Perdagangan Usaha Mikro Kecil Menengah dari Offline Menjadi Online Selama Masa Pandemi Covid-19. *Lex Privatum Unsrat*